

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC

Sukma Syafikri Multi

Universitas Lambung Mangkurat

sukmasyafikri@gmail.com

Sustinah Limarjani

Universitas Lambung Mangkurat

sustinah.limaryani@gmail.com

Abstract

State revenue from the tax during the 2016-2018 has decreased and increased. The obstacles encountered by the government in maximizing tax revenue are caused by differences in perception between the government as a policy maker and the company as a taxpayer. The company will avoid tax by utilizing the weaknesses (gray area) contained in tax regulations to minimize the amount of tax payable.

This study examines the factors that influence the presentation of tax avoidance conducted by companies. Tax avoidance will be tested by the influence of 4 variables, that is institutional ownership, leverage, firm size, and fiscal lost compensation. Tax avoidance is used as the dependent variable in this research that measured using the current effective tax rate (CETR). This research developed by combining theories, phenomena, and data presented by researchers.

The population of this research is a mining companies who listed on BEI in 2016-2018. Sample selection is by purposive sampling based on certain criteria and obtaining a sample of 22 mining companies. The analysis technique applied is multiple linear analysis through the IBM SPSS Version 26 for Windows program.

Results of this research indicate tax avoidance was affected by leverage. While the institutional ownership, firm size, and fiscal lost compensation does not significantly influence the tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, cash effective tax rate, mining companies*

PENDAHULUAN

Saat ini pertumbuhan usaha di Indonesia semakin meningkat sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor perpajakan. Hal ini juga diimbangi dengan melimpahnya sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia yang strategis sehingga dapat menarik para investor untuk menumbuhkembangkan usahanya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia.

Pemerintah terus menaruh perhatian khusus pada sektor perpajakan ini. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perolehan dari pajak setiap tahunnya. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang berasaskan semangat kebersamaan tetapi juga dengan memperhatikan kondisi yang sedang dan akan dihadapi. Pada nyatanya penerimaan pajak di Indonesia masih belum tercapai secara maksimal sesuai dengan harapan. Target dari penerimaan sektor pajak di tahun 2016 sebesar 1.539,2 triliun rupiah dengan realisasi penerimaannya sekitar 83,5% atau 1.285 triliun rupiah. Selanjutnya target pada tahun 2017 diturunkan menjadi 1.283,6 triliun rupiah, namun realisasi penerimaannya hanya mencapai angka 1.151,5 triliun rupiah atau 89,70%, apabila dibanding tahun 2016 penerimaan ini lebih rendah. Target penerimaan mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke angka 1.424 triliun rupiah dan realisasi pada tahun tersebut mencapai 1.315,93 triliun rupiah atau 92,41%.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk terus memaksimalkan penerimaan pajak. Langkah yang diupayakan pemerintah diantaranya yaitu dengan membuat kewajiban untuk memberikan kelengkapan data dan informasi oleh wajib pajak yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 35 dan 35A yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2012. Jenis data yang diberikan kepada DJP yaitu yang berhubungan dengan *asset*, *liabilities*, penghasilan, beban-beban yang dikeluarkan, serta transaksi maupun kegiatan ekonomi dari wajib pajak.

Kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak selalu ditemui oleh pemerintah. Diantaranya disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan perusahaan selaku wajib pajak. Pemerintah menilai bahwa pajak sebagai pendapatan negara yang selanjutnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada persepsi perusahaan, pajak menjadi beban yang akan menurunkan profit yang diperoleh perusahaan, tentunya semakin besar profit yang didapat perusahaan akan berakibat pada beban pajak yang semakin meningkat. Perbedaan persepsi tersebut membuat perusahaan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) guna meminimalkan pembayaran pajak sehingga dapat membayar pajak dengan efisien sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh perusahaan. Strategi perencanaan pajak ini dilakukan dengan tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang bertentangan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi dengan melakukan penghematan pajak ataupun *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang masih sejalan dengan ketentuan perpajakan.

Kontribusi sektor pertambangan dinilai sangat besar dalam perekonomian Indonesia khususnya pada pertambangan batu bara. Wajar apabila sektor pertambangan ini menjadi salah satu sektor andalan Indonesia selama puluhan tahun. Namun hal tersebut membuat pengawasan terhadap sektor ini melemah, hingga sering kali muncul kasus seperti kerusakan lingkungan maupun praktik immoral berupa perilaku penghindaran pajak. Menurut catatan Kementerian Keuangan dari keseluruhan usaha di sektor pertambangan yang mendapat izin usaha, perbandingan antara yang melaporkan SPT dengan yang tidak melaporkan yaitu lebih besar yang tidak melaporkan. Wajib pajak yang melapor pun masih ada kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan SPT-nya merupakan hasil dari rekayasa atau *tax avoidance* (penghindaran pajak). Indikator sebagaimana disebutkan pada judul riset merupakan beberapa faktor yang menurut teori dan penelitian sebelumnya dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.

Hasil riset sebelumnya dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan perlu dilakukan penelitian kembali. Jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu, indikator-indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal merupakan beberapa indikator yang hasilnya masih berbeda pada setiap hasil penelitian dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Dengan berdasar pada hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah keempat indikator tersebut memiliki pengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini penting dilakukan agar para pembuat kebijakan dapat mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penghindaran pajak, dan menyiapkan kebijakan lanjutan yang memungkinkan untuk meminimalisir perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen*. Teori ini memaparkan bahwa pihak *principal* (pemegang saham) dalam aktivitas operasional perusahaan tidak terlibat secara langsung karena pihak ini yang menyediakan dana maupun fasilitas lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Sementara pihak *agen* (manajemen) yang akan menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya pihak manajemen ini harus mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan pada pihak pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Astuti & Aryani, 2016).

Principal (pemegang saham) berharap agar *agen* menjalankan aktivitas perusahaan dan setiap pengambilan keputusannya sejalan dengan tujuan pemegang saham. *Principal* mengharapkan pengalokasian yang besar terhadap laba sesuai dengan keadaan sebenarnya pada perusahaan. Tetapi pihak *agen* (manajemen) juga memiliki kepentingannya pribadi, dimana *agen* yang telah bekerja dengan maksimal menginginkan bonus yang besar pula. Sehingga dari perbedaan ini akan menimbulkan konflik diantara keduanya.

Pajak

Pajak memiliki definisi sebagai partisipasi wajib dari pribadi maupun badan yang mengikat dengan penerapannya yang berlandaskan undang-undang, kompensasi yang diberikan bersifat tidak langsung, serta berperan untuk menjalankan kegiatan pemerintah (Resmi, 2014, p. 1).

Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regureled*. Fungsi *budgeter* menyatakan bahwa pajak sebagai sumber penghasilan atau penerimaan yang kemudian akan dialokasikan untuk pembiayaan-pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh negara. Sementara fungsi *regureled* yaitu fungsi pajak yang dapat mengatur di berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Rangkuti, et al., 2018, p. 3).

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dibagi ke dalam 3 (tiga) metode, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. *Official assessment system* menyatakan bahwa aparaturnya perpajakan langsung yang akan menghitung dan melakukan pemungutan atas pajak dari wajib pajak. Selanjutnya *self assessment system* menyatakan bahwa kewenangan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan dilakukan langsung oleh wajib pajak itu sendiri. Metode terakhir yaitu *withholding system* merupakan metode yang menyerahkan kesempatan pada pihak ketiga yang dipercaya untuk menghitung besaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak selama tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Resmi, 2014, p. 11).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah teknik atau cara dengan tujuan agar mengurangi pajak yang dibayarkan tetapi dengan cara yang diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebaliknya perilaku ilegal dalam menghindari perpajakan yaitu *tax evasion* dan berisiko dikenakan sanksi hukum. *Tax avoidance* berorientasi pada memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dari peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham pada perusahaan yang dipegang oleh institusi dalam maupun luar negeri baik itu bank, perusahaan investasi, pemerintah, maupun institusi yang lain (Juniarti dan Sentosa, 2009) dalam (Fadila, 2017). Sehingga diharapkan kepatuhan dan kinerja dari pihak manajemen akan meningkat seiring dengan adanya institusi yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan.

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan dalam menilai perbandingan *asset* pada perusahaan yang ditanggung oleh utang. Dengan mengetahui rasio ini maka pihak pemilik dana dapat memperkirakan seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menunaikan semua kewajibannya (Kasmir, 2016, p. 151).

Ukuran Perusahaan

Perusahaan pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu perusahaan ukuran besar, perusahaan ukuran menengah, dan perusahaan ukuran kecil (Machfoedz, 1994) dalam

(Kurniasih & Sari, 2013). *Firm size* (ukuran perusahaan) dilihat melalui total aset yang berada di dalam perusahaan (Hartono, 2017, p. 480).

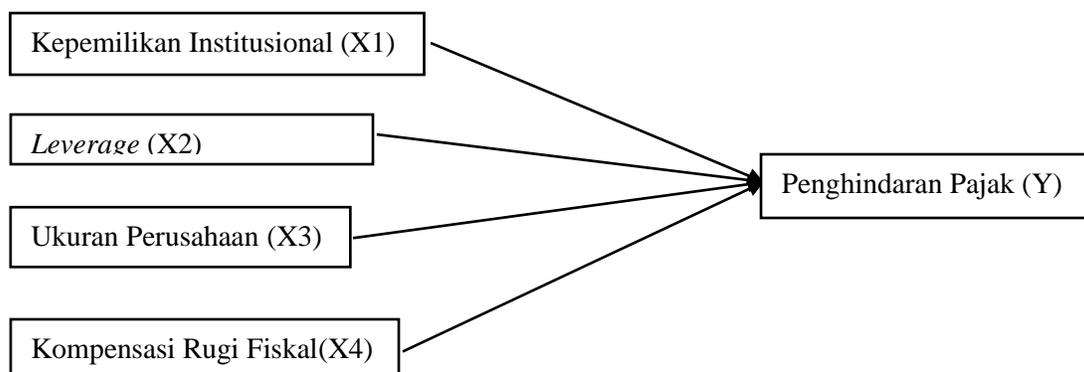
Kompensasi Rugi Fiskal

Ketentuan perpajakan menyatakan bahwa entitas yang mengalami kerugian dalam suatu tahun pelaporan, maka akan mendapat kompensasi rugi fiskal. Kompensasi tersebut berlaku sampai dengan lima tahun. Dalam waktu kompensasi tersebut perusahaan juga mendapatkan keringanan untuk tidak membayar pajak (Dwi Martani, 2016, p. 261). Kerugian perusahaan yang dimaksud merujuk pada kerugian setelah pajak bukan kerugian sebelum pajak.

HIPOTESIS PENELITIAN

Perusahaan dan pemerintah memiliki sudut pandang yang berbeda ketika berkaitan dengan perpajakan. Pemerintah menilai bahwa pajak sebagai pendapatan negara yang selanjutnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada persepsi perusahaan, pajak menjadi beban yang akan menurunkan profit yang didapat perusahaan, sehingga semakin besarnya profit yang didapat perusahaan akan berakibat pada beban pajak yang semakin meningkat. Adanya perbedaan pandangan tersebut membuat perusahaan berupaya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Sehingga terbentuk praduga bahwa variabel yang telah disebutkan pada judul riset memiliki kemampuan dalam mempengaruhi penghindaran pajak dengan gambaran model seperti di bawah ini:

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: (Dibuat oleh penulis, 2019)

METODE PENELITIAN

Peneliti menguji pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian ini bisa disebut juga penelitian asosiatif dengan melakukan pendekatan kuantitatif.

Sektor usaha pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 3 periode (2016-2018) dipilih sebagai populasi riset. Populasi tersebut berjumlah 49 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan pemberian beberapa kriteria yang telah ditentukan atau bisa juga disebut teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2017, p. 443). Kriteria dalam penentuan sampel yaitu perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di dalam bursa selama tahun 2016-2018, perusahaan pertambangan yang melaporkan *annual report* dengan lengkap selama tahun 2016-2018, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami penghapusan pencatatan saham di bursa dalam rentang tahun 2016-2018, serta perusahaan pertambangan yang mencatatkan laba komersial selama tahun 2016-2018. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, 22 perusahaan memenuhi kriteria sebagai sampel.

Definisi Operasional Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak menggunakan pengukuran *current effective tax rate* (CETR). Pembebanan tarif pajak terhadap WP badan yang diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 yaitu 25%, apabila nilai CETR berada di bawah tarif pajak tersebut maka mengindikasikan semakin besar perilaku penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan. Rumus perhitungan CETR yaitu sebagai berikut (Dwi Martani, 2016, p. 274):

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Variabel ini menggunakan pengukuran dengan rumus sebagai berikut (Siregar dan Utama, 2005) dalam (Fadila, 2017):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{saham yg dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yg beredar}}$$

Leverage

Pengukuran *leverage* menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). Perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2016, p. 158):

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

Ukuran Perusahaan

Indikator ini menggunakan perhitungan matematis sebagai berikut (Hartono, 2017, p. 480):

$$\text{Size} = \ln(\text{total aset})$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Pengukuran indikator ini menggunakan pengukuran dengan skala *dummy*. Data akan diberikan nilai 1 apabila dalam tahun pengamatan pada suatu perusahaan mencatatkan adanya kompensasi rugi fiskal, namun apabila dalam perusahaan tidak mencatatkan adanya kompensasi rugi fiskal akan diberikan nilai 0.

Teknik Analisis Data

Analisis kuantitatif regresi linear berganda dipilih sebagai teknik analisis penelitian yang diterapkan. Proses analisis menggunakan bantuan aplikasi *IBM SPSS Version 26 for Windows*. Peneliti melakukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
2. Memenuhi kriteria *classical assumption* untuk model regresi linear berganda dengan 4 *test assumption* (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas).
3. Membuat model regresi linear berganda.
4. Uji fit model (*R square test* dan statistik F) untuk menguji kelayakan model hubungan seluruh variabel.
5. Menguji hipotesis yang sudah dibentuk untuk menemukan hasil penelitian dengan melakukan uji statistik t.

HASIL DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik menampilkan hasil *mean*, standar deviasi, serta angka tertinggi dan terendah untuk 66 pengamatan terhadap indikator yang memberikan pengaruh dan indikator yang diberikan pengaruh. Untuk indikator kompensasi rugi fiskal karena menggunakan skala pengukuran *dummy*, maka menggunakan pengukuran frekuensi.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
SQRT_Y	66	.09	1.01	.5577	.13873
LN_X1	66	-3.15	1.84	-.3858	.70521
LN_X2	66	-1.83	1.79	-.2498	.83033
X3	66	27.14645	32.25922	29.6606876	1.31836000
Valid N (listwise)	66				

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Tabel 2. Frekuensi Kompensasi Rugi Fiskal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	51	77.3	77.3	77.3
	1	15	22.7	22.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Normalitas

Nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki angka signifikansi sebesar 0.060. Hal ini menunjukkan bahwa sampel terdistribusi normal sehingga menunjukkan syarat model regresi sudah memenuhi syarat normalitas ($0.060 > 0.05$).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.Sig. (2-tailed) >0.05	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.060	Berdistribusi Normal

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Autokorelasi

Durbin-Watson test menunjukkan angka 1.903. Angka dL, dU, dan 4-dU diketahui masing-masing adalah 1.4758, 1.7319, dan 2.2681. Angka tersebut menunjukkan model regresi bebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai <i>Durbin-Watson</i>
1.903

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Multikolinearitas

Nilai *Variance Inflation Factor* untuk setiap variabel X adalah 1.070, 1.245, 1.115, dan 1.103. Selain itu nilai *tolerance* untuk setiap variabel adalah 0.935, 0.804, 0.897, dan 0.906. Berdasarkan nilai tersebut maka antar variabel X terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor</i>
Kepemilikan Institusional (X1)	0.935	1.070
<i>Leverage</i> (X2)	0.804	1.245
Ukuran Perusahaan (X3)	0.897	1.115
Kompensasi Rugi Fiskal (X4)	0.906	1.103

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Heteroskedastisitas

Nilai uji *Gletsjer* untuk setiap variabel X menghasilkan angka yang di atas standar minimum 0.05, secara berurutan nilai ujinya yaitu 0.072, 0.401, 0.084, dan 0.223. Maka penelitian ini memenuhi syarat untuk dinyatakan homoskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Kepemilikan Institusional (X1)	0.072
Leverage (X2)	0.401
Ukuran Perusahaa (X3)	0.084
Kompensasi Rugi Fiskal (X4)	0.223

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Analisis Regresi Linear Berganda

Nilai konstanta dalam persamaan linear sebesar 1.137 yang mengartikan bahwa variabel dependen akan bernilai 1.137 ketika nilai variabel independen 0. Koefisien untuk variabel kepemilikan institusional, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal adalah 0.011, 0.068, dan 0.006. Koefisien dari ketiga variabel tersebut menunjukkan hubungan searah dengan *current effective tax rate*. Sedangkan konstanta untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan hubungan berlawanan dengan *current effective tax rate* dengan nilai -0.019. Nilai *standard error* dalam penelitian ini adalah 0.392. Persamaan regresi yang diperoleh menghasilkan model berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$
$$Y = 1.137 + 0.011 \text{Kepemilikan Institusional} + 0.068 \text{Leverage} - 0.019 \text{Ukuran Perusahaan} + 0.006 \text{Kompensasi Rugi Fiskal} + 0.392$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

R Square test menunjukkan angka 0.145 atau 14.5%. Hal ini menandakan kemampuan indikator terpilih dalam menjelaskan variabel Y sebesar 14.5%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh indikator lain sebesar 85.5%.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.381 ^a	.145	.089	.13239

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Statistik F

Variabel X secara keseluruhan mampu memprediksi variabel Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} serta *sig* secara berurutan senilai 2.592 dan 0.045. Hasil F_{hitung} lebih besar dari 2.52 (F_{tabel}) dan nilai signifikansi di bawah 0.05.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.182	4	.045	2.592	.045 ^b
	Residual	1.069	61	.018		
	Total	1.251	65			

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Uji Statistik t

Variabel *leverage* memiliki hasil uji yang signifikan dikarenakan hasil t_{hitung} serta *sig* secara berurutan senilai 3.101 dan 0.003. Hasil t_{hitung} lebih besar dari 1.99962 (t_{tabel}) $3.101 > 1.99962$, diikuti oleh nilai signifikansi di bawah 0.05. Sementara untuk variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal memiliki hasil uji sebaliknya, ditandai dengan hasil t_{hitung} berada di bawah nilai t_{tabel} dan juga tingkat signifikansi ketiga variabel tersebut berada di atas 0.005.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

No	Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Hasil Uji	Keterangan
1	Kepemilikan Institusional	0.474	1.99962	0.637	Tidak Signifikan	Hipotesis ditolak
2	<i>Leverage</i>	3.101	1.99962	0.003	Signifikan	Hipotesis diterima
3	Ukuran Perusahaan	-1.433	1.99962	0.157	Tidak Signifikan	Hipotesis ditolak
4	Kompensasi Rugi Fiskal	0.153	1.99962	0.879	Tidak Signifikan	Hipotesis ditolak

Sumber: (Data Output SPSS 26, 2020)

Pembahasan Hasil

Perbedaan sudut pandang antara *principal* dan *agen* menimbulkan konflik di dalam perusahaan. *Principal* (pemegang saham) berharap agar *agen* menjalankan aktivitas perusahaan dan setiap pengambilan keputusannya sejalan dengan tujuan pemegang saham. Tetapi pihak *agen* (manajemen) juga memiliki kepentingannya pribadi. Sehingga pengawasan pada pihak manajemen akan meningkat dalam sebuah perusahaan sejalan dengan meningkatnya komposisi dari kepemilikan institusi. Namun pada uji statistik t menunjukkan hasil yang berbeda dengan nilai t_{hitung} dan *sig* secara berurutan senilai 0.474 dan 0.637. Hasil t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang mempunyai nilai 1.99962 ($0.474 < 1.99962$) dan nilai signifikansi di atas 0.05. Sehingga penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tidak dipengaruhi oleh faktor kepemilikan institusional. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pemilik institusional dalam hal pengelolaan pajak perusahaan tidak terlibat langsung untuk mengawasi dan mengontrol setiap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen. Selain itu pemilik institusional lebih berorientasi pada kesejahteraannya melalui perolehan profit yang didapat dari perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Herdiyanto & Ardiyanto, 2015), (Tandean, 2016), dan (Sunarsih & Oktavia, 2016), tetapi menunjukkan hasil yang berbeda pada (Sara, 2016) dan (Fadila, 2017).

Uji statistik t untuk variabel *leverage* memiliki hasil uji yang signifikan dikarenakan hasil t_{hitung} serta *sig* secara berurutan senilai 3.101 dan 0.003. Hasil t_{hitung} lebih besar dari 1.99962 (t_{tabel}) $3.101 > 1.99962$, diikuti oleh nilai signifikansi di bawah 0.05. Dengan hasil tersebut maka *leverage* berpengaruh secara positif terhadap CETR dan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan CETR dan penghindaran pajak berbanding terbalik. Bagi pihak yang memberi pinjaman, dengan nilai rasio yang semakin besar maka menandakan risiko pinjaman tidak dapat tertagih akan semakin tinggi, hal tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Sehingga dengan semakin rendah nilai rasio ini, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari pemilik dana untuk memperoleh pinjaman. Semakin banyak pinjaman yang didapat oleh perusahaan maka akan menambah pembayaran bunga pinjaman, dengan tingginya bunga pinjaman akan mengakibatkan menurunnya nilai laba setelah pajak, sehingga berpengaruh terhadap pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan yang dilakukan (Ganiswari, 2019) dan (Annisa, 2017), tetapi menunjukkan hasil yang berbeda pada (Kurniasih & Sari, 2013), (Oktagiani, 2015), dan (Fadila, 2017).

Transaksi dalam perusahaan akan semakin kompleks sejalan dengan semakin besarnya perusahaan tersebut, selain itu juga dana yang diperlukan perusahaan untuk keberlangsungan usaha akan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Faktor ini membuat pihak manajemen untuk mengurangi beban-beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh, termasuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Namun pada uji statistik t menunjukkan hasil yang berbeda dengan nilai t_{hitung} dan sig secara berurutan senilai -1.433 dan 0.157. Hasil t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang mempunyai nilai 1.99962 ($-1.433 < 1.99962$) dan nilai signifikansi lebih dari 0.05. Sehingga faktor ukuran perusahaan dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan yang menghasilkan laba terus-menerus secara konsisten menandakan bahwa semakin baik perusahaan tersebut mengelola asetnya, hal ini membuat perusahaan tidak perlu untuk mengurangi beban yang dikeluarkannya dengan melakukan penghindaran pajak. Disamping itu juga dengan semakin besarnya ukuran dari sebuah perusahaan akan membuat pihak pajak memberikan pengawasan yang lebih ketat agar perusahaan selalu mematuhi peraturan perpajakan dalam setiap operasi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan (Annisa, 2017) dan (Ganiswari, 2019), tetapi menunjukkan hasil yang berbeda dengan (Kurniasih & Sari, 2013), (Oktagiani, 2015), dan (Fadila, 2017).

Perusahaan yang menanggung rugi fiskal disebutkan dalam regulasi perpajakan akan mendapatkan kompensasi rugi fiskal, dimana hal tersebut berlaku selama lima tahun berikutnya dan perusahaan akan terbebas dari pembayaran pajak selama periode kompensasi tersebut. Hal ini dapat membuat perusahaan untuk memanipulasi laporan perusahaan agar dapat terbebas dari pembayaran pajak. Namun hasil uji statistik t menunjukkan hasil yang berbeda dengan dengan nilai t_{hitung} dan sig secara berurutan senilai 0.153 dan 0.879. Hasil t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} yang mempunyai nilai 1.99962 ($0.153 < 1.99962$) dan nilai signifikansi di atas 0.05. Sehingga penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan tidak dipengaruhi oleh indikator kompensasi rugi fiskal. Perusahaan akan tetap menutupi kerugian dengan keuntungan tahun selanjutnya apabila tahun sebelumnya perusahaan tersebut mendapatkan kompensasi. Sehingga dengan ada tidaknya kompensasi rugi fiskal dalam sebuah perusahaan tidak memberikan kebebasan perusahaan dalam perpajakan, perusahaan yang memperoleh laba netto dan telah menggunakan seluruh kompensasi rugi fiskalnya akan tetap menanggung hutang pajak. Hasil riset ini

menunjukkan hasil yang sama dengan (Oktagiani, 2015) dan (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015), tetapi menunjukkan hasil yang berbeda pada (Kurniasih & Sari, 2013) dan (Fadila, 2017).

SIMPULAN

Kesimpulan

Satu dari empat variabel dalam riset ini memberikan pengaruh pada perilaku penghindaran pajak yaitu variabel *leverage*. Sementara tiga lainnya yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal tidak memberikan pengaruh pada perilaku penghindaran pajak. Hal ini disebabkan indikator tersebut belum dapat secara berarti mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Implikasi Hasil

Implikasi secara teoritis dalam riset ini untuk memberikan pemahaman, gambaran, pengetahuan, dan menjadi referensi untuk peneliti yang akan melanjutkan kajian di bidang yang sama, terutama yang akan meneliti indikator yang dapat mempengaruhi perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pengamat selanjutnya bisa menguji kembali variabel yang hasilnya masih belum konsisten dan menambah variabel-variabel lain untuk diuji. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa perilaku penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh indikator *leverage*. Namun terdapat indikator yang tidak berpengaruh pada perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal.

Secara praktis riset ini diharapkan dapat menyadarkan wajib pajak untuk selalu melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat menghambat penyelenggaraan pembangunan negara. Sehingga pendapatan dari sektor perpajakan dapat digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memiliki gambaran untuk terus meningkatkan pengawasan dan mengkaji lebih lanjut mengenai perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Keterbatasan

Nilai koefisien dalam riset ini hanya sebesar 14.5%, sehingga masih banyak indikator-indikator lain selain daripada indikator yang diterapkan dalam riset ini yang dapat memberi pengaruh penghindaran pajak pada perusahaan. Riset ini juga hanya melakukan pengamatan

selama tiga tahun pengamatan saja yaitu 2016-2018 dan masih dapat dikembangkan lagi dengan menambah rentang waktu periode pengamatan agar mendapat hasil yang lebih akurat.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang digunakan agar tidak terbatas pada sektor pertambangan saja. Selain itu juga dalam riset berikutnya dapat ditambahkan indikator-indikator lain yang diduga dapat memberi pengaruh pada perilaku *tax avoidance* perusahaan seperti indikator komite audit, umur perusahaan, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015). *JOM Fekon, Vol. 4 No.1*, 685-698.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 03*, 375-392.
- Dwi Martani, S. V. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *JOM Fekon, Vol.4 No.1*, 1671-1684.
- Ganiswari, R. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017).
- Hartono, J. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Herdianto, D. G., & Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 4 No. 3*, 1-10.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *BULETIN STUDI EKONOMI, Volume 18, No. 1*, 58-66.
- Oktagiani, R. (2015). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*, 1-15.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, I. E., Rangkute, M. I., Hidayat, O. S., Limarjani, S., Anwar, K., Wahyudi, H., . . . Seralurin, Y. C. (2018). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus* (3 ed.). Medan: Madenatera.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2013). *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 473-483.
- Sara, D. M. (2016). Pengaruh Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *JOM Fekon, 3*, 2223-2237.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 6*, 923-932.
- Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 11*, 54-62.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perusahaan Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	Adaro Energy Tbk.	ADRO
2	Aneka Tambang Tbk.	ANTM
3	Baramulti Suksessarana Tbk.	BSSR
4	Bayan Resources Tbk.	BYAN
5	Bukit Asam Tbk.	PTBA
6	Citatah Tbk.	CTTH
7	Delta Dunia Makmur Tbk.	DOID
8	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	DSSA
9	Elnusa Tbk.	ELSA
10	Golden Energy Mines Tbk.	GEMS
11	Harum Energy Tbk.	HRUM
12	Indo Tambangraya Megah Tbk.	ITMG
13	J Resources Asia Pasifik Tbk.	PSAB
14	Medco Energi Internasional Tbk.	MEDC
15	Mitrabara Adiperdana Tbk.	MBAP
16	Radiant Utama Interinsco Tbk.	RUIS
17	Ratu Prabu Energi Tbk.	ARTI
18	Resource Alam Indonesia Tbk.	KKGI
19	Samindo Resources Tbk.	MYOH
20	Surya Eka Perkasa Tbk.	ESSA
21	Timah Tbk.	TINS
22	Toba Bara Sejahtera Tbk.	TOBA

Lampiran 2. Data Variabel Penghindaran Pajak (Y)

No	Kode	Tahun	Beban Pajak Kini	Laba Sebelum Pajak	CETR	SQRT_Y
1	ADRO	2016	245.844.000	546.520.000	0,44984	0,67
		2017	427.922.000	929.531.000	0,46036	0,68
		2018	425.526.000	820.998.000	0,51830	0,72
2	ANTM	2016	2.016.736.000	237.291.595.000	0,00850	0,09
		2017	52.725.661.000	454.396.524.000	0,11603	0,34
		2018	293.740.296.000	1.265.501.806.000	0,23211	0,48
3	BSSR	2016	8.289.684	35.592.255	0,23291	0,48
		2017	29.298.068	111.688.566	0,26232	0,51
		2018	24.826.109	93.354.875	0,26593	0,52
4	BYAN	2016	23.036.128	29.502.709	0,78081	0,88
		2017	80.177.815	420.082.773	0,19086	0,44
		2018	157.696.558	696.732.272	0,22634	0,48
5	PTBA	2016	651.847.000.000	2.696.916.000.000	0,24170	0,49
		2017	1.598.336.000.000	6.067.783.000.000	0,26341	0,51
		2018	1.728.854.000.000	6.799.056.000.000	0,25428	0,50
6	CTTH	2016	6.804.660.600	26.764.367.473	0,25424	0,50
		2017	2.009.639.000	6.947.634.696	0,28926	0,54
		2018	5.144.644.600	9.340.812.634	0,55077	0,74
7	DOID	2016	25.231.390	60.709.743	0,41561	0,64
		2017	38.938.374	86.702.705	0,44910	0,67
		2018	31.478.715	107.902.359	0,29173	0,54
8	DSSA	2016	12.991.950	97.648.030	0,13305	0,36
		2017	44.917.456	191.361.218	0,23473	0,48
		2018	39.261.537	194.314.521	0,20205	0,45
9	ELSA	2016	84.516.000.000	418.318.000.000	0,20204	0,45
		2017	86.057.000.000	326.366.000.000	0,26368	0,51
		2018	89.119.000.000	351.807.000.000	0,25332	0,50
10	GEMS	2016	12.928.738	48.916.736	0,26430	0,51
		2017	44.114.126	167.307.676	0,26367	0,51
		2018	36.652.592	135.530.697	0,27044	0,52
11	HRUM	2016	8.729.380	29.391.728	0,29700	0,54
		2017	17.881.168	73.030.968	0,24484	0,49
		2018	12.147.468	48.191.469	0,25207	0,50
12	ITMG	2016	60.983.000	191.991.000	0,31763	0,56
		2017	100.513.000	362.055.000	0,27762	0,53
		2018	106.337.000	367.363.000	0,28946	0,54
13	PSAB	2016	15.297.852	40.504.896	0,37768	0,61
		2017	10.830.551	27.979.164	0,38709	0,62

		2018	15.058.042	29.156.544	0,51645	0,72
14	MEDC	2016	48.067.158	260.298.173	0,18466	0,43
		2017	133.829.115	295.482.625	0,45292	0,67
		2018	147.330.594	198.836.390	0,74096	0,86
15	MBAP	2016	9.362.309	36.173.315	0,25882	0,51
		2017	23.340.768	78.722.858	0,29649	0,54
		2018	16.100.541	67.621.314	0,23810	0,49
16	RUIS	2016	24.395.771.523	53.994.709.090	0,45182	0,67
		2017	19.048.695.849	37.874.919.864	0,50294	0,71
		2018	19.668.540.623	44.579.949.867	0,44120	0,66
17	ARTI	2016	171.445.750	2.038.622.269	0,08410	0,29
		2017	8.051.346.500	32.871.481.999	0,24493	0,49
		2018	16.408.606.500	45.792.570.511	0,35832	0,60
18	KKGI	2016	5.086.326	14.689.875	0,34625	0,59
		2017	6.414.373	19.637.007	0,32665	0,57
		2018	849.318	1.119.843	0,75843	0,87
19	MYOH	2016	7.887.942	29.452.922	0,26782	0,52
		2017	4.887.135	17.016.672	0,28720	0,54
		2018	10.049.923	41.447.529	0,24247	0,49
20	ESSA	2016	247.369	244.885	1,01014	1,01
		2017	1.580.907	4.252.472	0,37176	0,61
		2018	4.015.256	24.423.351	0,16440	0,41
21	TINS	2016	173.069.000.000	414.970.000.000	0,41706	0,65
		2017	198.660.000.000	716.211.000.000	0,27738	0,53
		2018	186.258.000.000	766.482.000.000	0,24300	0,49
22	TOBA	2016	10.653.542	25.984.193	0,41000	0,64
		2017	18.994.879	60.195.507	0,31555	0,56
		2018	27.657.977	97.281.622	0,28431	0,53

Lampiran 3. Data Variabel Kepemilikan Institusional (X₁)

No	Kode	Tahun	Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham yang Beredar	Kepemilikan Institusional	LN_X ₁
1	ADRO	2016	10.673.693.245	31.985.962.000	0,33370	-1,10
		2017	26.233.741.093	31.985.962.000	0,82016	-0,20
		2018	25.437.767.035	31.985.962.000	0,79528	-0,23
2	ANTM	2016	5.977.038.218	24.030.764.725	0,24872	-1,39
		2017	5.727.998.808	24.030.764.725	0,23836	-1,43
		2018	5.840.863.068	24.030.764.725	0,24306	-1,41
3	BSSR	2016	2.461.112.274	2.616.500.000	0,94061	-0,06
		2017	2.453.090.774	2.616.500.000	0,93755	-0,06
		2018	2.472.180.974	2.616.500.000	0,94484	-0,06
4	BYAN	2016	333.333.500	3.333.333.500	0,10000	-2,30
		2017	333.338.000	3.333.333.500	0,10000	-2,30
		2018	333.338.000	3.333.333.500	0,10000	-2,30
5	PTBA	2016	2.255.514.639	2.304.131.850	0,97890	-0,02
		2017	11.122.689.325	11.520.659.250	0,96546	-0,04
		2018	11.293.224.108	11.520.659.250	0,98026	-0,02
6	CTTH	2016	638.867.152	1.230.839.821	0,51905	-0,66
		2017	642.704.152	1.230.839.821	0,52217	-0,65
		2018	571.241.478	1.230.839.821	0,46411	-0,77
7	DOID	2016	6.112.749.208	8.325.016.732	0,73426	-0,31
		2017	6.284.995.436	8.553.342.132	0,73480	-0,31
		2018	6.139.594.983	8.611.686.432	0,71294	-0,34
8	DSSA	2016	750.395.493	770.552.320	0,97384	-0,03
		2017	750.545.793	770.552.320	0,97404	-0,03
		2018	750.534.393	770.552.320	0,97402	-0,03
9	ELSA	2016	5.167.747.873	7.298.500.000	0,70806	-0,35
		2017	5.167.747.873	7.298.500.000	0,70806	-0,35
		2018	8.957.900.165	7.298.500.000	1,22736	0,20
10	GEMS	2016	5.872.736.100	5.882.353.000	0,99837	0,00
		2017	5.870.451.400	5.882.353.000	0,99798	0,00
		2018	5.875.528.000	5.882.353.000	0,99884	0,00
11	HRUM	2016	2.444.723.368	2.703.620.000	0,90424	-0,10
		2017	2.507.136.968	2.703.620.000	0,92733	-0,08
		2018	2.477.235.768	2.703.620.000	0,91627	-0,09
12	ITMG	2016	1.096.462.063	1.129.925.000	0,97038	-0,03
		2017	1.068.056.482	1.129.925.000	0,94525	-0,06
		2018	1.054.101.957	1.129.925.000	0,93290	-0,07
13	PSAB	2016	0	26.460.000.000	0,00000	0,00
		2017	0	26.460.000.000	0,00000	0,00

		2018	0	26.460.000.000	0,00000	0,00
14	MEDC	2016	3.142.652.069	3.332.451.450	0,94305	-0,06
		2017	16.351.675.155	16.301.385.703	1,00308	0,00
		2018	16.397.901.652	17.829.192.501	0,91972	-0,08
15	MBAP	2016	7.731.814.752	1.227.271.952	6,30000	1,84
		2017	1.104.550.852	1.227.271.952	0,90000	-0,11
		2018	1.104.550.852	1.227.271.952	0,90000	-0,11
16	RUIS	2016	378.147.000	770.000.000	0,49110	-0,71
		2017	409.409.000	770.000.000	0,53170	-0,63
		2018	33.033.000	770.000.000	0,04290	-3,15
17	ARTI	2016	5.129.508.636	7.840.000.000	0,65427	-0,42
		2017	3.506.776.837	7.840.000.000	0,44729	-0,80
		2018	3.506.776.837	7.840.000.000	0,44729	-0,80
18	KKGI	2016	960.717.863	1.000.000.000	0,96072	-0,04
		2017	4.312.586.735	5.000.000.000	0,86252	-0,15
		2018	4.292.500.000	5.000.000.000	0,85850	-0,15
19	MYOH	2016	1.762.490.776	2.206.312.500	0,79884	-0,22
		2017	1.788.193.979	2.206.312.500	0,81049	-0,21
		2018	1.738.463.179	2.206.312.500	0,78795	-0,24
20	ESSA	2016	608.834.000	1.100.000.000	0,55349	-0,59
		2017	6.874.015.880	11.000.000.000	0,62491	-0,47
		2018	8.669.545.777	14.300.000.000	0,60626	-0,50
21	TINS	2016	6.805.886.116	7.447.753.454	0,91382	-0,09
		2017	6.542.690.263	7.447.753.454	0,87848	-0,13
		2018	6.537.496.285	7.447.753.454	0,87778	-0,13
22	TOBA	2016	1.673.205.000	2.012.491.000	0,83141	-0,18
		2017	1.675.636.800	2.012.491.000	0,83262	-0,18
		2018	1.675.636.800	2.012.491.000	0,83262	-0,18

Lampiran 4. Data Variabel *Leverage* (X_2)

No	Kode	Tahun	Total Utang	Ekuitas	DER	LN_X ₂
1	ADRO	2016	2.736.375.000	3.785.882.000	0,72278	-0,32
		2017	2.722.520.000	4.091.627.000	0,66539	-0,41
		2018	2.758.063.000	4.302.692.000	0,64101	-0,44
2	ANTM	2016	11.572.740.239.000	18.408.795.573.000	0,62865	-0,46
		2017	11.523.869.935.000	18.490.403.517.000	0,62324	-0,47
		2018	13.567.160.084.000	19.739.230.723.000	0,68732	-0,37
3	BSSR	2016	56.636.529	127.345.381	0,44475	-0,81
		2017	60.246.779	149.890.675	0,40194	-0,91
		2018	94.820.865	150.279.337	0,63096	-0,46
4	BYAN	2016	636.535.687	188.150.974	3,38311	1,22
		2017	373.209.321	515.603.819	0,72383	-0,32
		2018	472.793.557	678.070.334	0,69726	-0,36
5	PTBA	2016	8.024.369.000.000	10.552.405.000.000	0,76043	-0,27
		2017	8.187.497.000.000	13.799.985.000.000	0,59330	-0,52
		2018	7.903.237.000.000	16.269.696.000.000	0,48576	-0,72
6	CTTH	2016	301.007.248.281	314.954.751.984	0,95572	-0,05
		2017	378.839.294.845	321.412.470.019	1,17867	0,16
		2018	408.160.870.584	327.614.020.993	1,24586	0,22
7	DOID	2016	755.806.919	126.468.785	5,97623	1,79
		2017	768.413.436	177.167.976	4,33720	1,47
		2018	922.583.702	261.511.009	3,52790	1,26
8	DSSA	2016	949.178.800	1.283.328.210	0,73962	-0,30
		2017	1.282.671.892	1.454.320.756	0,88197	-0,13
		2018	1.873.497.037	1.513.293.846	1,23803	0,21
9	ELSA	2016	1.313.213.000.000	2.877.743.000.000	0,45633	-0,78
		2017	1.803.449.000.000	3.051.920.000.000	0,59092	-0,53
		2018	2.357.127.000.000	3.300.200.000.000	0,71424	-0,34
10	GEMS	2016	112.751.314	264.918.686	0,42561	-0,85
		2017	298.251.273	292.218.111	1,02065	0,02
		2018	385.233.714	315.812.916	1,21982	0,20
11	HRUM	2016	57.935.532	355.430.321	0,16300	-1,81
		2017	63.582.349	395.860.722	0,16062	-1,83
		2018	79.502.404	388.486.791	0,20465	-1,59
12	ITMG	2016	302.362.000	907.430.000	0,33321	-1,10
		2017	400.524.000	958.139.000	0,41802	-0,87
		2018	472.945.000	969.783.000	0,48768	-0,72
13	PSAB	2016	510.853.623	342.085.869	1,49335	0,40
		2017	571.225.579	350.024.364	1,63196	0,49

		2018	546.490.283	369.864.743	1,47754	0,39
14	MEDC	2016	2.706.621.747	890.508.856	3,03941	1,11
		2017	3.758.113.809	1.402.672.048	2,67925	0,99
		2018	3.865.132.439	1.387.261.307	2,78616	1,02
15	MBAP	2016	24.745.376	91.630.383	0,27006	-1,31
		2017	38.474.621	122.304.341	0,31458	-1,16
		2018	49.328.008	124.181.254	0,39723	-0,92
16	RUIS	2016	619.413.387.232	359.719.063.530	1,72194	0,54
		2017	579.058.872.159	380.288.865.591	1,52268	0,42
		2018	584.415.358.540	405.956.960.152	1,43960	0,36
17	ARTI	2016	885.646.642.382	1.731.148.904.614	0,51159	-0,67
		2017	745.890.738.650	1.760.159.081.900	0,42376	-0,86
		2018	899.432.629.231	1.793.023.079.975	0,50163	-0,69
18	KKGI	2016	14.299.044	84.409.706	0,16940	-1,78
		2017	16.433.699	88.619.899	0,18544	-1,69
		2018	30.558.484	86.706.737	0,35243	-1,04
19	MYOH	2016	39.773.001	107.481.261	0,37005	-0,99
		2017	33.526.632	102.541.343	0,32696	-1,12
		2018	37.338.363	113.987.735	0,32756	-1,12
20	ESSA	2016	458.949.567	210.267.941	2,18269	0,78
		2017	609.096.227	211.698.082	2,87719	1,06
		2018	600.798.588	323.725.177	1,85589	0,62
21	TINS	2016	3.894.946.000.000	5.653.685.000.000	0,68892	-0,37
		2017	5.814.816.000.000	6.061.493.000.000	0,95930	-0,04
		2018	8.596.067.000.000	6.521.881.000.000	1,31803	0,28
22	TOBA	2016	113.843.825	147.744.334	0,77055	-0,26
		2017	173.538.605	174.799.423	0,99279	-0,01
		2018	286.259.322	215.623.872	1,32759	0,28

Lampiran 5. Data Variabel Ukuran Perusahaan (X_3)

No	Kode	Tahun	Total Aset	LN Total Aset (X_3)
1	ADRO	2016	88.138.608.108.108	32,10993
		2017	92.083.067.567.568	32,15371
		2018	102.329.782.608.696	32,25922
2	ANTM	2016	29.981.535.812.000	31,03160
		2017	30.014.273.452.000	31,03269
		2018	33.306.390.807.000	31,13677
3	BSSR	2016	2.471.980.942.760	28,53604
		2017	2.847.005.202.547	28,67729
		2018	3.549.090.674.776	28,89771
4	BYAN	2016	11.080.489.977.196	30,03621
		2017	12.041.640.420.720	30,11939
		2018	16.665.660.005.571	30,44437
5	PTBA	2016	18.576.774.000.000	30,55293
		2017	21.987.482.000.000	30,72149
		2018	24.172.933.000.000	30,81625
6	CTTH	2016	615.962.000.265	27,14645
		2017	700.251.764.864	27,27471
		2018	735.774.891.577	27,32419
7	DOID	2016	11.922.644.648.649	30,10946
		2017	12.778.127.189.189	30,17876
		2018	17.160.792.913.044	30,47365
8	DSSA	2016	31.892.957.285.714	31,09341
		2017	39.099.894.971.429	31,29714
		2018	48.382.726.900.000	31,51016
9	ELSA	2016	4.190.956.000.000	29,06395
		2017	4.855.369.000.000	29,21111
		2018	5.657.327.000.000	29,36397
10	GEMS	2016	5.395.285.714.286	29,31655
		2017	8.000.940.162.602	29,71058
		2018	10.145.392.619.392	29,94804
11	HRUM	2016	5.905.226.471.429	29,40686
		2017	6.563.472.442.857	29,51254
		2018	6.685.559.928.571	29,53097
12	ITMG	2016	16.254.765.312.000	30,41941
		2017	18.407.166.324.000	30,54376
		2018	20.892.144.168.000	30,67039
13	PSAB	2016	8.529.393.920.000	29,77454
		2017	9.212.499.430.000	29,85158

		2018	13.280.507.623.188	30,21732
14	MEDC	2016	48.609.873.013.514	31,51485
		2017	69.740.349.418.919	31,87580
		2018	76.121.648.492.754	31,96335
15	MBAP	2016	1.564.190.309.140	28,07839
		2017	2.178.233.377.176	28,40954
		2018	2.512.587.623.022	28,55233
16	RUIS	2016	979.132.450.762	27,60993
		2017	959.347.737.750	27,58952
		2018	990.372.318.692	27,62135
17	ARTI	2016	2.616.795.546.996	28,59297
		2017	2.506.049.820.550	28,54973
		2018	2.692.455.709.206	28,62147
18	KKGI	2016	1.326.250.765.000	27,91338
		2017	1.423.266.145.704	27,98398
		2018	1.698.117.665.301	28,16054
19	MYOH	2016	1.978.508.264.232	28,31336
		2017	1.843.448.925.300	28,24266
		2018	2.191.353.225.138	28,41554
20	ESSA	2016	8.922.900.106.667	29,81964
		2017	11.243.757.657.534	30,05083
		2018	13.398.895.144.928	30,22619
21	TINS	2016	9.548.631.000.000	29,88742
		2017	11.876.309.000.000	30,10557
		2018	15.117.948.000.000	30,34690
22	TOBA	2016	3.515.969.879.032	28,88834
		2017	4.720.027.479.675	29,18284
		2018	7.263.143.183.792	29,61383

Lampiran 6. Data Variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X₄)

No	Kode	Tahun	Kompensasi Rugi Fiskal
1	ADRO	2016	0
		2017	0
		2018	0
2	ANTM	2016	1
		2017	0
		2018	0
3	BSSR	2016	0
		2017	0
		2018	0
4	BYAN	2016	0
		2017	1
		2018	0
5	PTBA	2016	0
		2017	0
		2018	0
6	CTTH	2016	0
		2017	0
		2018	0
7	DOID	2016	0
		2017	0
		2018	0
8	DSSA	2016	0
		2017	1
		2018	1
9	ELSA	2016	0
		2017	0
		2018	0
10	GEMS	2016	1
		2017	0
		2018	0
11	HRUM	2016	0
		2017	0
		2018	0
12	ITMG	2016	1
		2017	0
		2018	1
13	PSAB	2016	0
		2017	0

		2018	1
14	MEDC	2016	0
		2017	1
		2018	0
15	MBAP	2016	1
		2017	1
		2018	1
16	RUIS	2016	0
		2017	0
		2018	0
17	ARTI	2016	0
		2017	0
		2018	0
18	KKG I	2016	1
		2017	1
		2018	1
19	MYOH	2016	0
		2017	0
		2018	0
20	ESSA	2016	0
		2017	0
		2018	0
21	TINS	2016	0
		2017	0
		2018	0
22	TOBA	2016	0
		2017	0
		2018	0